



Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama di Sekolah: Studi Terhadap Efektivitas dan Tantangan di Lapangan

Sakban Sakban^{1*}, Carina Septiani², Sri Mulyani³, Nur Azmi⁴, Aida Efendy⁵, Muthia Azzahra⁶

¹⁻⁶ Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Email : sakban@umri.ac.id^{1*}, carinaseptiani@gmail.com², sm948366@gmail.com³, nurazzmi02@gmail.com⁴, aidafendy04@gmail.com⁵, azzahramuthia14@gmail.com⁶

Abstract. Religious education plays a crucial role in shaping students' character and instilling moral and spiritual values. This study aims to analyze the implementation of religious education policies in schools, focusing on the effectiveness of implementation, challenges faced by teachers and institutions, and its impact on students. The research employed a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that although religious education policies are formally included in the curriculum, their implementation in practice still faces several obstacles, such as limited resources, lack of teacher training, and diverse religious backgrounds of students. Recommendations include improving teacher training, strengthening the curriculum, and adopting an inclusive approach that respects religious diversity.

Keywords: education policy, qualitative descriptive, Religious education

Abstrak. Pendidikan agama memiliki peranan penting dalam membentuk karakter peserta didik dan menanamkan nilai-nilai moral serta spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan agama di sekolah, mencakup efektivitas pelaksanaannya, tantangan yang dihadapi oleh guru dan lembaga pendidikan, serta dampaknya terhadap siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan agama telah diatur secara formal dalam kurikulum, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, dan perbedaan latar belakang agama peserta didik. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan pelatihan guru, penguatan kurikulum, dan pendekatan inklusif yang menghormati keragaman agama.

Kata Kunci: deskriptif kualitatif, kebijakan pendidikan, Pendidikan agama

1. PENDAHULUAN

Pendidikan agama memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila, khususnya sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, pendidikan agama menjadi sarana penting dalam pembentukan karakter, moral, dan etika peserta didik. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga untuk membentuk sikap keberagamaan yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan (Wahid, 2024).

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Kebijakan-kebijakan ini menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya,

dan bahwa satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama bagi semua peserta didik.

Meskipun secara normatif kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Sulistiyarningsih et al., 2023). Di beberapa sekolah, pelaksanaan pendidikan agama tidak berjalan optimal karena keterbatasan guru profesional, belum tersedianya buku ajar yang sesuai, serta kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan orang tua. Selain itu, masih terdapat perbedaan dalam pemahaman dan penerapan kebijakan di berbagai daerah, terutama yang memiliki tingkat keberagaman agama yang tinggi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana kebijakan pendidikan agama benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif dan merata di seluruh satuan pendidikan (Rusdiana, 2011). Di sisi lain, sekolah sebagai lingkungan sosial yang dinamis juga dihadapkan pada realitas keberagaman peserta didik yang menuntut pendekatan inklusif dan dialogis dalam pembelajaran agama. Pendekatan semacam ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya eksklusivisme keagamaan dan konflik antar siswa yang berbeda keyakinan.

Selain tantangan internal, implementasi pendidikan agama juga bergantung pada kesiapan eksternal seperti dukungan dari pemerintah daerah, penyediaan pelatihan bagi guru, dan keberlanjutan evaluasi kurikulum. Tanpa sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksana teknis di sekolah, pendidikan agama akan sulit mencapai tujuan idealnya sebagai pembentuk karakter bangsa yang religius, toleran, dan berkeadaban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pendidikan agama di sekolah, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pembentukan karakter siswa (Destian et al., 2024). Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perumusan strategi peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan agama yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan zaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pendidikan agama di sekolah, termasuk efektivitas pelaksanaannya, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peserta didik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna dan realitas sosial yang kompleks melalui pandangan para pelaku pendidikan di lingkungan sekolah.

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas guru pendidikan agama, kepala sekolah, dan peserta didik. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sekolah yang menjadi lokasi penelitian dipilih dari jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta, yang berada di wilayah dengan tingkat keberagaman agama yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang representatif dan kontekstual mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan agama di tengah keberagaman tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi (Sulistiyaningih et al., 2023). Wawancara dilakukan kepada guru dan kepala sekolah untuk memperoleh informasi mengenai strategi pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta persepsi terhadap kebijakan pendidikan agama. Observasi dilakukan secara langsung pada proses pembelajaran di kelas dan kegiatan keagamaan sekolah untuk menangkap dinamika nyata pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi seperti kurikulum, silabus, RPP, dan program kerja keagamaan sekolah. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, dilakukan member check kepada informan untuk mengkonfirmasi kembali hasil interpretasi data agar lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik, dan akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar temuan. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan agama di sekolah, serta memberikan kontribusi bagi penyempurnaan kebijakan dan praktik pendidikan keagamaan di masa depan.

3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan agama di sekolah, khususnya bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam proses pembelajaran dan kegiatan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti

kualitas dan ketersediaan guru, kesiapan sarana prasarana, dukungan kelembagaan, serta kondisi sosial dan budaya sekolah yang beragam.

Tujuan lainnya adalah untuk memahami persepsi serta peran para pelaku pendidikan—terutama guru, kepala sekolah, dan peserta didik—dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan agama. Penelitian ini juga mengevaluasi dampak implementasi kebijakan terhadap pembentukan karakter siswa, termasuk nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan tanggung jawab sosial. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi penyempurnaan kebijakan dan strategi implementasi pendidikan agama yang lebih efektif dan kontekstual di lingkungan sekolah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan agama di sekolah secara umum telah berjalan sesuai dengan pedoman formal yang ditetapkan dalam kurikulum nasional. Pendidikan agama diberikan kepada setiap siswa sesuai agama yang dianutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Winata et al., 2021). Di sebagian besar sekolah, pendidikan agama masuk ke dalam struktur kurikulum dengan beban belajar yang relatif seragam, yaitu satu hingga dua jam pelajaran setiap minggu. Selain kegiatan intrakurikuler, beberapa sekolah juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan keagamaan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini tidak sepenuhnya merata dan efektif di seluruh satuan pendidikan. Perbedaan kualitas pelaksanaan terlihat mencolok antara sekolah di daerah perkotaan dan sekolah di daerah terpencil. Sekolah di kota umumnya memiliki guru yang memadai untuk semua agama, sedangkan di daerah tertentu, masih ditemukan kekurangan guru agama, khususnya bagi siswa yang menganut agama minoritas. Akibatnya, beberapa siswa tidak mendapatkan pembelajaran agama sesuai agamanya, atau justru tidak mendapatkan pelajaran sama sekali karena tidak adanya tenaga pendidik yang sesuai.

Selain masalah ketersediaan guru, kualitas pembelajaran pendidikan agama juga menjadi sorotan. Masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah satu arah tanpa memberikan ruang untuk diskusi, refleksi, atau penerapan nilai dalam kehidupan nyata siswa (Damanik & Lestari, 2024). Pendekatan pembelajaran yang kurang variatif ini membuat peserta didik cenderung pasif dan hanya menjadikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran formal yang perlu dihafal demi nilai ujian. Padahal, pendidikan agama idealnya menjadi sarana internalisasi nilai spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang proaktif dan memahami pentingnya pendidikan karakter cenderung memberi dukungan lebih kepada guru agama, baik dari sisi alokasi waktu, pengadaan sarana, maupun penguatan program keagamaan. Sebaliknya, kepala sekolah yang hanya berfokus pada capaian akademik konvensional kerap mengabaikan peran strategis pendidikan agama dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkarakter.

Sarana dan prasarana pendukung juga menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi (Maizah & Ratnawati, 2024). Sekolah yang memiliki fasilitas memadai seperti ruang ibadah, alat bantu ajar digital, buku teks yang sesuai, serta akses terhadap sumber belajar lainnya, lebih mampu menyajikan pembelajaran yang kaya dan kontekstual. Di sekolah yang fasilitasnya terbatas, guru sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi secara optimal. Kurangnya bahan ajar dan media pembelajaran juga membuat guru kesulitan mengaitkan nilai agama dengan peristiwa sosial atau kehidupan keseharian peserta didik.

Faktor eksternal seperti keterlibatan orang tua dan masyarakat juga memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Sekolah yang menjalin kemitraan erat dengan masyarakat dan tokoh agama lokal cenderung memiliki program keagamaan yang lebih hidup dan berkelanjutan (Cahyaningrum & Suyitno, 2022). Orang tua yang aktif mendampingi pendidikan agama anak di rumah juga berkontribusi positif terhadap keberhasilan pembelajaran. Di sisi lain, kurangnya komunikasi dan keterlibatan orang tua menyebabkan pendidikan agama terputus antara rumah dan sekolah, menjadikan proses internalisasi nilai kurang maksimal.

Dalam observasi di beberapa sekolah, ditemukan adanya upaya inovatif dari guru dalam menyampaikan materi pendidikan agama secara lebih kontekstual (Lestari et al., 2025). Guru mengaitkan nilai-nilai agama dengan isu-isu sosial kontemporer seperti toleransi beragama, keadilan, lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial. Metode seperti studi kasus, diskusi kelompok, proyek sosial, dan literasi kitab suci digunakan untuk menumbuhkan sikap reflektif dan kritis. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam membentuk karakter siswa dan meningkatkan relevansi pembelajaran agama dalam kehidupan mereka.

Namun demikian, hambatan tetap muncul dalam bentuk beban administratif guru, kurangnya pelatihan pedagogis yang spesifik untuk pendidikan agama, serta belum adanya sistem evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas implementasi kebijakan ini. Banyak guru menyatakan bahwa pelatihan yang mereka terima masih bersifat umum dan belum menyentuh persoalan-persoalan kontekstual seperti pengajaran agama di tengah masyarakat

multikultural atau pencegahan ekstremisme melalui pendidikan (*Pendidikan Islam Berwawasan*, n.d.).

Dari sisi teori implementasi kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh tiga faktor utama: kejelasan kebijakan, sumber daya pelaksana, dan dukungan lingkungan. Dalam konteks pendidikan agama, kebijakan pemerintah sudah cukup jelas dalam perumusan, tetapi pelaksanaan di tingkat sekolah belum sepenuhnya konsisten (Athiyah et al., 2025). Rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya dukungan struktural, serta minimnya pelibatan pemangku kepentingan turut menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan agama di sekolah, perlu dilakukan penguatan dari berbagai aspek: peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengadaan sarana dan bahan ajar yang relevan, peran aktif kepala sekolah dalam memfasilitasi program keagamaan, serta peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat. Pendidikan agama tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pendidikan yang terpadu, di mana nilai-nilai moral dan spiritual dibangun secara menyeluruh melalui kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan (Detha et al., 2019).

Pendidikan agama di sekolah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan untuk membentuk karakter dan moral peserta didik. Kebijakan ini diwujudkan melalui kurikulum pendidikan agama yang disesuaikan dengan agama yang dianut oleh peserta didik, serta didukung oleh tenaga pendidik yang profesional. Implementasi kebijakan ini secara umum telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat nilai-nilai religius di kalangan pelajar, baik di sekolah negeri maupun swasta (Lie, 2024). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama terus mendorong peningkatan kualitas materi ajar, kompetensi guru, dan evaluasi pembelajaran agama di sekolah.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan guru pendidikan agama, terutama di daerah terpencil, yang menyebabkan kurang optimalnya proses pembelajaran. Selain itu, masih ada kendala dalam penyediaan buku teks dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurangnya pelatihan berkala bagi guru juga turut memengaruhi kemampuan mereka dalam menyampaikan materi secara kontekstual dan sesuai perkembangan zaman. Beberapa sekolah juga menghadapi tantangan dalam mengakomodasi

pendidikan agama untuk peserta didik dengan agama minoritas karena keterbatasan tenaga pengajar yang sesuai (Mirrota, 2024).

Efektivitas implementasi pendidikan agama juga bergantung pada peran aktif sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengamalan nilai-nilai keagamaan. Dalam praktiknya, pembelajaran agama yang hanya bersifat kognitif tanpa pembinaan afektif dan spiritual sering kali kurang membekas dalam kehidupan siswa sehari-hari (Marzukah et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih integratif dan aplikatif, seperti melalui kegiatan keagamaan di luar kelas, pembiasaan nilai-nilai moral, serta integrasi dengan mata pelajaran lain. Hal ini menuntut kreativitas guru dalam mengembangkan metode pengajaran yang menyentuh aspek sikap dan perilaku siswa.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan pendidikan agama di sekolah telah memiliki dasar hukum dan arah yang jelas, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi, menyediakan sarana-prasarana yang memadai, serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat harus ditingkatkan untuk mewujudkan pendidikan agama yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter spiritual yang kuat pada peserta didik.

Salah satu solusi utama untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan agama di sekolah adalah dengan memperkuat kompetensi guru pendidikan agama (Mauzifa et al., 2025). Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi kekurangan guru agama yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu menambah kuota rekrutmen guru agama melalui jalur ASN maupun PPPK dengan prioritas penempatan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, pelatihan berkelanjutan harus diadakan secara berkala guna meningkatkan kemampuan pedagogik, penguasaan teknologi pembelajaran, serta pendekatan kontekstual dan inklusif dalam mengajar materi agama. Sertifikasi dan pelatihan daring juga perlu diperluas agar dapat diakses secara merata oleh guru di seluruh Indonesia.

Tantangan lain yang kerap ditemui adalah keterbatasan sarana dan bahan ajar. Banyak sekolah belum memiliki buku teks agama yang sesuai dengan kurikulum terbaru dan perkembangan zaman, serta kurangnya media pembelajaran interaktif. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dapat menjalin kerja sama dengan penerbit dan lembaga keagamaan guna mengembangkan modul ajar berbasis digital dan kontekstual. Sekolah juga perlu diarahkan untuk memanfaatkan

teknologi informasi seperti platform e-learning, video edukatif, dan media sosial yang mendidik untuk menunjang pembelajaran agama yang lebih menarik dan relevan.

Dalam hal pendekatan pembelajaran, pendidikan agama sering kali hanya menekankan aspek kognitif, padahal aspek afektif dan psikomotorik sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan kontekstual perlu diterapkan, misalnya dengan mengintegrasikan praktik keagamaan ke dalam keseharian siswa melalui kegiatan rutin seperti doa bersama, pesantren kilat, bakti sosial, atau mentoring keagamaan. Guru juga didorong untuk mengaitkan materi ajar dengan isu-isu aktual seperti toleransi antarumat beragama, etika penggunaan media sosial, dan tanggung jawab sosial, agar siswa mampu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan nyata.

Terakhir, keberhasilan implementasi pendidikan agama tidak lepas dari dukungan lingkungan, terutama keluarga dan masyarakat. Sekolah perlu menjalin sinergi yang kuat dengan orang tua dan tokoh agama setempat melalui forum komunikasi dan kegiatan bersama yang mendorong pembinaan karakter religius siswa di luar jam pelajaran. Kegiatan parenting, pelatihan nilai keagamaan bagi orang tua, serta kolaborasi dengan organisasi keagamaan lokal dapat memperluas jangkauan pendidikan nilai dan memperkuat internalisasi ajaran agama dalam kehidupan siswa sehari-hari. Dengan sinergi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, pendidikan agama akan menjadi lebih efektif dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berintegritas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan agama di sekolah telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum, proses pembelajaran pendidikan agama telah menjadi bagian dari kegiatan kurikuler dan didukung oleh berbagai kegiatan non-kurikuler yang bertujuan membentuk karakter dan sikap religius peserta didik. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat sekitar.

Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi keterbatasan guru profesional untuk setiap agama, kurangnya pelatihan guru dalam pengajaran moderasi beragama dan pendekatan inklusif, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Di sisi lain, faktor-faktor pendukung seperti kepemimpinan sekolah yang visioner, budaya sekolah yang religius, serta dukungan masyarakat dan orang tua memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan pendidikan agama di sekolah.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui penyediaan tenaga pengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, pelatihan berkelanjutan bagi guru, evaluasi program secara berkala, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Athiyah, U., Syaifuddin, M., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). *KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR PROSES*. 07(3), 169–180.
- Cahyaningrum, D., & Suyitno, S. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter Religius Siswa Sd Muhammadiyah Karangakajen Ii Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 65–76. <https://doi.org/10.21831/jpka.v13i1.40975>
- Damanik, H., & Lestari, P. (2024). Penggunaan Metode Ceramah Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Rukun Islam di SMPN 6 Kandis. *EduSpirit: Jurnal Pendidikan Kolaboratif*, 1(4), 484–490.
- Destian, I., Hadis Zenal Mutaqin, A., Erihadiana, M., At Taqwa Ciparay Bandung, S., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional tentang Moderasi Agama di Sekolah Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 3811–3820. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/939>
- Detha, A., Datta, F. U., Beribe, E., Foeh, N., & Ndaong, N. (2019). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. *Karakteristik Bakteri Asam Laktat Yang Diisolasi dari Susu Kuda Sumba*, 7(1)(1408), 274–282.
- Lestari, O., Putri, A., & Pandiangan, B. (2025). *Inovasi Metode Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa di Sekolah Dasar*. 04(02), 347–359.
- Lie, R. (2024). Peran Guru Agama dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah Negeri dan Swasta Bogor. *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, 2(1), 62–71. <https://doi.org/10.46445/nccet.v2i1.849>
- Maizah, M., & Ratnawati, R. (2024). Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Sebagai Penunjang Efektivitas Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 7(1), 49–59. <https://doi.org/10.31539/alignment.v7i1.9537>
- Marzukah, B., Tsanawiyah, M., Huda, Q., & Akhlak, A. (2025). *PENGARUH PEMBELAJARAN AKIDAH AHLAK BERBASIS*. 5(01).
- Mauzifa, M., Irawan, A., & Rahman, A. M. (2025). Relevansi Profesionalitas, Kebijakan, dan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam: Sebuah Tinjauan Kritis. ... : *Journal of Islamic Education*, 5(10), 112–135. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu/article/view/1468%0Ahttps://jurnalannur.ac.id/index.php/QuranicEdu/article/download/1468/395>
- Mirrota, D. D. (2024). Tantangan dan Solusi Pembelajaran Agama Islam di Sekolah Inklusi. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 13(1), 89–101. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v13i1.1423>

Pendidikan Islam Berwawasan. (n.d.).

Rusdiana, A. (2011). ... *Kebijakan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan dalam mewujudkan Akuntabilitas Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta: Studi di Tiga Kopertais: Kopertais*
<https://etheses.uinsgd.ac.id/10998/%0Ahttps://etheses.uinsgd.ac.id/10998/1/05-Disertasi.pdf>

Sulistiyaningsih, N., Fathullah, A. N., & Apriandhini, M. (2023). Implementasi Public Trust Doctrine dalam Pengambilan Kebijakan di Tingkat Daerah dan Pusat: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 70–86. <https://journal.upnvj.ac.id/>

Wahid, A. (2024). Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam: Implementasi dalam Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Scholars*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.31959/js.v2i1.2367>

Winata, K. A., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2021). Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Kurikulum Nasional. *Attractive: Innovative Education Journal*, 3(2), 138. <https://doi.org/10.51278/aj.v3i2.248>